Ikatan Guru Indonesia
Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia
Sekretariat: Graha Wiranesia, Jalan Kp. Utan No. 37-38,
Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12540
Posel: info@igi.or.id | Laman: www.igi.or.id

SIARAN PERS

Jakarta, 26 November 2026

IGI Dorong Sinergi Lintas Sektor dan Penguatan Peran Guru dalam Implementasi PP TUNAS untuk Perlindungan Anak di Ruang Digital

TANGERANG, IGI.OR.ID - Ikatan Guru Indonesia (IGI) menegaskan komitmennya mengawal perlindungan anak di ruang digital melalui keikutsertaan dalam Lokakarya Akselerasi Implementasi PP TUNAS melalui Sinergi Lintas Sektor. Kegiatan yang diinisiasi Lingkar Daerah Belajar (LDB) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini berlangsung pada Selasa-Rabu, 24-25 November 2026, di Harris Hotel & Convention Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten.

Forum ini membahas percepatan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS). Delegasi IGI hadir dari unsur perwakilan wilayah dan daerah, meliputi IGI Banten, IGI Jakarta Selatan, IGI Jakarta Timur, IGI Jakarta Pusat, IGI Jakarta Utara, IGI Kota Bogor, IGI Kabupaten Bogor, IGI Tangerang, dan IGI Depok. Lokakarya juga dihadiri tokoh nasional, pimpinan OPD, serta pemangku kepentingan dari Jabodetabek, Sumatera, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Sorotan Utama dan Pernyataan Narasumber

Dewan Penasihat Lingkar Daerah Belajar, Najelaa Shihab, menekankan bahwa keberhasilan regulasi harus diukur dari dampak langsungnya bagi anak, bukan sekadar kelengkapan administrasi.

"Sejak awal kesadarannya adalah kebijakan bukan hanya sesuatu yang terjadi dalam bentuk dokumen, bukan hanya hasil rapat ataupun bukti-bukti yang kemudian dirangkum dalam bentuk peraturan-peraturan. Tetapi target akhirnya tentu adalah perubahan yang nyata yang kemudian kita lihat dan dirasakan oleh anak-anak kita," ujar Najelaa.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyoroti kompleksitas ancaman di ruang digital-mulai dari konten negatif, perundungan siber, kecanduan digital, eksploitasi, hingga child grooming. Ia menegaskan bahwa keberhasilan PP TUNAS sangat bergantung pada keterlibatan pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan sekolah dan keluarga.

"Kebijakan ini tidak akan dapat berjalan efektif kalau tidak dibantu oleh pemerintah daerah," tegas Meutya. Senada dengan itu, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan bahwa melindungi anak dari dampak negatif teknologi informasi merupakan tanggung jawab bersama demi menyiapkan masa depan bangsa.

"Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar dampak negatif dari teknologi informasi, khususnya ruang digital, jangan sampai berpengaruh negatif kepada anakanak kita yang menjadi harapan kita untuk membuat Indonesia ini menjadi negara maju," ujar Tito Karnavian.

Sementara itu, pada hari kedua lokakarya, Ketua Komisi X DPR RI, Agung Widyantoro, mendorong

kepala daerah segera menerjemahkan kebijakan ini ke dalam langkah konkret dan dukungan anggaran yang memadai, termasuk alokasi anggaran pelatihan guru terkait Perlindungan Anak di Internet (PID).

Sikap dan Rekomendasi IGI

IGI menilai guru dan satuan pendidikan memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan peserta didik. Dalam forum ini, IGI merekomendasikan agar pemerintah daerah segera menyusun kebijakan turunan, memperkuat koordinasi lintas OPD, mengalokasikan anggaran, serta melibatkan organisasi profesi secara aktif.

Perwakilan delegasi IGI Kabupaten Bogor, Abdul Ghoni, menegaskan bahwa organisasi profesi guru siap menjadi mitra strategis pemerintah, sejalan dengan perhatian Ketua Umum PP IGI, Danang Hidayatullah. "IGI siap mendukung dan mengawal implementasi PP TUNAS. Namun, perlindungan anak di ruang digital tidak bisa hanya dibebankan kepada satu kementerian atau satu instansi. Diperlukan kolaborasi nyata seluruh sektor, terutama pemerintah daerah melalui OPD terkait, organisasi profesi seperti IGI, komunitas pendidikan, sekolah, guru, dan orang tua," ujar Ghoni.

Ia juga mengingatkan agar implementasi PP TUNAS tidak terjebak pada rutinitas seremonial semata.

"Jangan sampai implementasi kebijakan ini hanya berhenti pada kegiatan seremonial dan menghasilkan dokumen rekomendasi. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kebijakan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak. Ini harus diwujudkan melalui peningkatan kompetensi guru, penguatan literasi digital, edukasi keamanan digital, serta terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan ramah anak," tambahnya.

Melalui lokakarya ini, IGI berharap terbangun sinergi berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat demi mewujudkan ruang digital yang aman bagi generasi penerus Indonesia.

Tentang Ikatan Guru Indonesia (IGI)

Organisasi profesi guru yang mendorong peningkatan mutu pendidik dan ekosistem pendidikan kolaboratif melalui semangat Sharing and Growing Together.